

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di Puskesmas Koto Baru kabupaten pesisir selatan terhadap program UKM Esensial tahun 2022 dengan menggunakan teori George berlandaskan berbagai aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Perencanaan penganggaran bantuan operasional kesehatan pada puskesmas sudah sesuai dengan Juknis, dalam laporan perencanaan berupa RUK dan RKP serta Surat pertanggungjawaban dari pemegang program penimputan menggunakan entri manual di excel, pengadaan lokamini karya bulanan dan triwulan pada Puskesmas Koto Baru tahun 2022 telah dilaksanakan dengan kapasitas terbatas menggunakan protokol kesehatan.
2. Pengorganisasian sumber daya manusia pada Puskesmas Koto Baru belum mencukupi kualifikasi tenaga kesehatan lingkungan, ahli laboratorium dan pekarya, untuk tenaga kontrak di Puskesmas Koto Baru tahun 2022 hanya perekrutan perawat dan bidan desa.
3. Pelaksanaan implementasi bantuan operasional kesehatan untuk pagu program UKM esensial dan menu kegiatan UKM Esensial sudah sesuai dengan Juknis, Lalu persen realisasi penganggaran BOK telah tercantum dalam Juknis yaitu sebesar 75% dan yang terbaru 85% untuk dana UKM Esensial namun pihak puskesmas hanya bisa merealisasikan sebesar 75% termasuk dana pencegahan dan pengendalian covid 19, terjadi kendala dalam pencairan pendanaan Bantuan operasional kesehatan yang terhenti pada bulan juli sampai oktober menunggu perubahan dan rampungnya Juknis Nomor 19 Tahun 2022 serta tidak terealisasinya pendanaan intensif UKM pada tahun 2022 di rata rata puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Pesisir Selatan karena perhitungan rumus intensif yang rumit serta waktu yang terbatas.
4. Pengawasan berbasis aplikasi digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk melihat jalannya pelaksanaan BOK puskesmas, Pelaporan BOK sebagai bukti pengawasan dinas kesehatan tidak ditunjang dengan aplikasi

husus E Renggar secara langsung tetapi puskesmas menggunakan aplikasi E-BLUD dalam penyusunan pelaporan lalu membawa bukti cetak dokumen diserahkan kepada dinas kesehatan setiap bulannya. Lalu pengawasan secara struktural dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pesisir Selatan yang seharusnya minimal 2 kali dalam setahun per triwulan di puskesmas, namun pada hasil penelitian pihak dinas kesehatan hanya sekali melakukan pengecekan SPJ terkait administrasi BOK di puskesmas. pihak pengelola BOK Puskesmas Koto Baru membuat rekapan pelaporan BOK tetapi dalam penyerahan pelaporan mengalami keterlambatan sebanyak enam kali dalam tahun 2022, tidak ada pelatihan secara khusus terhadap pengelolaan BOK Puskesmas Koto Baru pada tahun 2022 untuk menunjang SDM kinerja pengelola BOK dalam menjalankan tugasnya.

5.2 Saran

1. Bagi Puskesmas Koto Baru

Bagi Puskesmas Koto Baru Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan dan masukan dari permasalahan yang ditemukan dalam implementasi pengelolaan seperti keterlambatan pelaporan, mengevaluasi kecukupan berdasarkan klasifikasi tenaga kerja dalam program UKM Esensial, memaksimalkan penyerapan anggaran lalu evaluasi kepatuhan pengelola BOK dalam pelaporan di puskesmas.

2. Bagi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi

Bagi Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi agar tidak hanya menjadikan penelitian ini sebagai dasar bacaan melainkan sebagai sumber kajian pengelola keuangan puskesmas khususnya peminatan administrasi kebijakan kesehatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan untuk membuat penelitian yang lebih dalam serta terperinci seperti IKU terhadap SDMK pengorganisasian lalu guna menyambung ilmu pengetahuan dalam hal terlaksananya pengelolaan bantuan operasional kesehatan pada puskesmas yang baik dan sesuai dengan dasar Permenkes.

